BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Dinas Pertanian tanaman Pangan

Propinsi Jawa barat

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat diresmikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12/1983, terletak di Jalan Surapati No. 71 Bandung - Jawa Barat.

Sebelum berstatus Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Instansi Pemerintah ini telah mengalami banyak perubahan baik nama, pengelolaan maupun dalam bidang usahanya. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas, akan penulis kemukakan tentang riwayat singkatnya.

Pada masa penjajahan Belanda ada beberapa lembaga yang menyelenggarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat diantaranya ialah *Provinciale Landbouw Voorlichtings Dienst* (LVD) yang dikepalai oleh *Landbouw Inspecteur* . Diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1912. LVD berfungsi memberikan pembinaan terhadap para petani untuk mempertinggi produksi sedangkan alih teknologi diberikan dalam batas tertentu berdasarkan pertimbangan politis. LVD sendiri terbagi atas tanaman rakyat (padi, palawija, sayur, buah-buahan) dan tanaman keras (kopi, karet, kapuk, kina dan teh). Secara organik, LVD berada dibawah *Department van*

Lanbouw Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian Perindustrian dan Perdagangan) di Batavia. Wilayah kerjanya terbagi atas 5, tingkat propinsi dan karesidenan dijabat oleh orang Belanda sedangkan tingkat kabupaten, kawedanaan dan kecamatan umumnya dijabat pribumi. Kelembagaan khusus lainnya yaitu *Zaad Hoeve* (Balai Benih Padi) didirikan tahun 1921 dan berkedudukan di Cihea, Cianjur dan dikelola oleh LVD. Untuk mendukung pelaksanaan, maka didirikan 3 Lembaga Pendidikan Pertanian yaitu *Cultuur School* (CS) di Sukabumi, *Midlebaare Landbouw School* (MLS) di Bogor dan *Landbouw Bedrijf Scool* (LBS) di Sumedang.

Tahun 1942 tentara sekutu dikalahkan oleh pasukan Jepang dalam Perang Dunia II, LVD (termasuk Balai Benih Padi) yang dikelola oleh Belanda diambil alih *Norinka* yang bernaung di bawah pemerintahan Jepang. Kebijaksanaan, program dan sistemnya tidak jauh berbeda dengan Belanda hanya tujuannya lebih diperluas dengan sasaran utama memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mensuplai keperluan perang bagi tentara Jepang. Sedangkan di bidang pendidikan perubahan ditandai dengan bergantinya nama *Landbouw Bedrijf Scholl* (LBS) menjadi sekolah Pertanian Pertama. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945 didirikan Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan lembaga di bawah Departemen Kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran

rakyat. Balai Benih Padi Cihea dilanjutkan oleh Jawatan Pertanian Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea). Sedangkan Sekolah Pertanian Pertama Tanjungsari, diubah menjadi sekolah Pendidikan Mantri Pertanian .

Pada tahun 1950 lahir Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan Undang-undang No. 11/1950. Sebagai tindak lanjut daru UU tersebut, terbit Peraturan Pemerintah No. 29/1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan tadi, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat menerbitkan SK. Dewan Pemerintah Daerah Sementara No. 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 yang membentuk 3 Jawatan Pertanian yaitu Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan Darat. SK tersebut juga menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Jawatan. Selanjutnya dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat di Daerah Tingkat II dengan maksud penyerahan urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada Daerah Tingkat II/ kotapraja di seluruh Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD-DPRD-GR/1961.

Akhirnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 197/A.V/18/SK/1975 tentang Perubahan Sebutan Jawatan menjadi Dinas, maka Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Tahun 1983, terbit SK.

Menteri Pertanian No. 2110/706/Kpts/1983 tanggal 27 September 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian - Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, sehingga nama pun disesuaikan menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2.2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Propinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi Diperta Jabar ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan UU No. 22/1999 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat. Struktur Organisasi terlampir.

Secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

I. Kepala Dinas dan wakil Kepala Dinas

II. Bagian Tata Usaha : Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum

III. Sub Dinas Bina Program : Seksi Data dan Informasi, Seksi Penyusunan Program, Seksi Evaluasi dan Pelaporan

IV. Sub Dinas Sumber Daya: Seksi Lahan dan Tata Guna Air, Seksi Sarana Produksi dan Mekanisasi, Seksi Sumber Daya Manusia Pertanian

V. Sub Dinas Padi dan Palawija : Seksi Produksi Padi, Seksi Produksi Palawija, Seksi Perlintan Padi dan Palawija

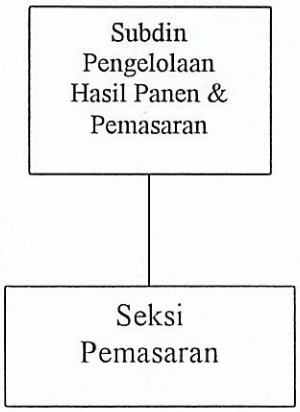
VI. Sub Dinas Hortikultura: Seksi Produksi Sayuran, Seksi Produksi Buah dan Aneka Tanaman, Seksi Perlintan Hortikultura

VII. Sub Dinas Pengelolaan Hasil dan Pemasaran : Seksi Pengelolaan Pasca Panen , Seksi Kelembagaan Usaha, Seksi Pemasaran.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

PROPINSI JAWA BARAT



Sumber :

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
No. 15 Tahun 2000 Tgl. 12 Desember 2000
Tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat **(Data diolah)**

2.3 Deskripsi Jabatan

1. Subdinas Pengolahan Hasil Panen dan Pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pengelolaan hasil panen dan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan
2. Rincian Tugas Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran :
    a. Merencanakan perumusan rencana kerja Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran
    b. Menyelenggarakan perumusan bahan sertifikasi produksi/hasil pertanian tanaman pangan
    c. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi,pedoman standarisasi dan pengembangan usaha jasa pertanian tanaman pangan
    d. Menyelenggarakan perumusan bahan koordinasi dan mediasi kemitraann antar pelaku usaha pertanian tanaman pangan
3. Rincian Tugas Seksi Pemasaran
    a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemasaran
    b. melaksanakan penyusunan data kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan
    c. melaksanakan penyusunan bahan pedoman,fasilitasi dan supervisi pengembangan system pemasaran dan pola tata niaga komoditas pertanian ntanaman pangan
    d. melaksanakan penyusunan bahan pola permintaan,penawaran,prospek dan perluasan segmen pasar komoditas pertanian tanaman pangan

e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan media promosi pemasaran hasil pertanian tanaman pangan
f. melaksanakan penyusunahn bahan pedoman,standarisasi dahn supervisi serta fasilitasi pengembangan system informasi pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan
g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemasarankomoditas pertanian tanama pangan
h. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemasaran

4. Pekerjaan Seksi Pemasaran
   a. Mengumpulkan informasi tentang Haraga sayuran
   b. Measukan informasi harga sayuran tersebut kedalam Komputer
   c. Menghitung rata-rata harga sayuran disetiap daerah pemasaran
   d. Membuat laporan tentang informasi harga sayuran
   e. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan fasilitasi pengembangan penganekaragaman tanaman pangan pasca panen
   f. Melaksanakanpenyusunan data informasi harga sayuran
   g. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi pengembangan kawasan wilayah usaha pertanian
   h. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan usaha jasa pertanian tanaman pangan

i. Melaksanakan penyusunan bahan standarisasi mutu hasil dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan

j. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan informasi harga

5. Tanggung Jawab Seksi Pemasaran

a. Seksi pemasaran bertanggung jawab menciptakan terlaksananya evaluasi pengembangan informasi pemasaran

b. Memberikan suatu keputusanterhadap setiap permasalahan yang timbul dalam pekerjaannya

c. Mencari prospek pasar dan memberikan penawaran kepada para petani

d. Mendukung terealisasinya kebijakan perusahaan

e. Mengawasi terlaksananya evaluasi pengembangan informasi pemasaran

f. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul pada seksinya

g. Menyelenggarakan, mengatur dan memelihara hubungan kerja yang baik antar Seksi

h. Menyiapkan informasi harga sayuran dan laporan penjualan bulanan

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Salah satu yang harus dilaksanakan oleh pimpinan unit pelayanan informasi pasar yaitu melaksanakan pembinaan petugas pelayanan informasi pasar di daerah-daerah produksi, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan penyelenggaraan laporan pasar sebagai tindak lanjut dari kegiatan Kepala Sub Dinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran, diselenggarakan pertemuan seluruh anggota petugas pelayanan informasi pasar setiap triwulan di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat.

Dari pertemuan seluruh petugas secara berkala diharapkan atau dapat segera mengetahui permasalahan yang menjadi kesulitan, dan didapatkan pemecahannya pada saat itujuga. Upaya Pembinaan juga dimaksud untuk menambah wawasan sesuai bidang kerjanya, diantaranya dengan mengikutsertakan petugas dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Sub Dinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran.

Demikian halnya petugas-petugas dimasing-masing Sub Unit disertakan dalam rapat-rapat teknis Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran Tingkat Propinsi sekaligus mengadakan pertemuan khusus PIP untuk mengadakan evaluasi kegiatan dimasing-masing Sub Unit, sehingga dapat diharapkan semua permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan akan segera diketahui dan diharapkan segera dicari pemecahan secepatnya.

- **Lokasi PIP**

Penempatan PIP di Jawa Barat dalam upaya pelayanan kepada petani didasarkan kepada wilayah sentra produksi hortikultura. Adapun Lokasi PIP paradigma baru ini direncanakan sebagai berikut:

1. Kabupaten Bandung

➢ PIP Lembang

Alamat : Pasar Lembang

Petugas : 2 (dua) orang (Endang Wahyudin dan Asep S)

Wilayah Kerja : Kecamatan Cisalak Kasomalang, Sagalaherang Kecamatan Lembang, Parompong, Cisarua.

2. Kabupaten Bandung

➢ PIP Ciwidey

Alamat : Jl. Raya Pasir Jambu Ciwidey

Petugas : 1 (satu) orang (Deden Sutisna)

Wilayah Kerja : Kecamatan Pasir Jambu, SoreangKabupaten Bandung

➢ PIP Pangalengan

Alamat : Jl. Raya Pangalengan

Petugas : 1 (satu) orang (Imran Safrin)

Wilayah Kerja : Kecamatan Ciamaung Banjaran, Kecamatan Kertasari

3. Kabupaten Cianjur

➢ PIP Cipanas

Alamat : Jl. Raya Pacet Cipanas

Petugas : 2 (orang)

(Fatah Hidayat dan Trisuseno)

Wilayah Kerja : Kecamatan Karang Tengah

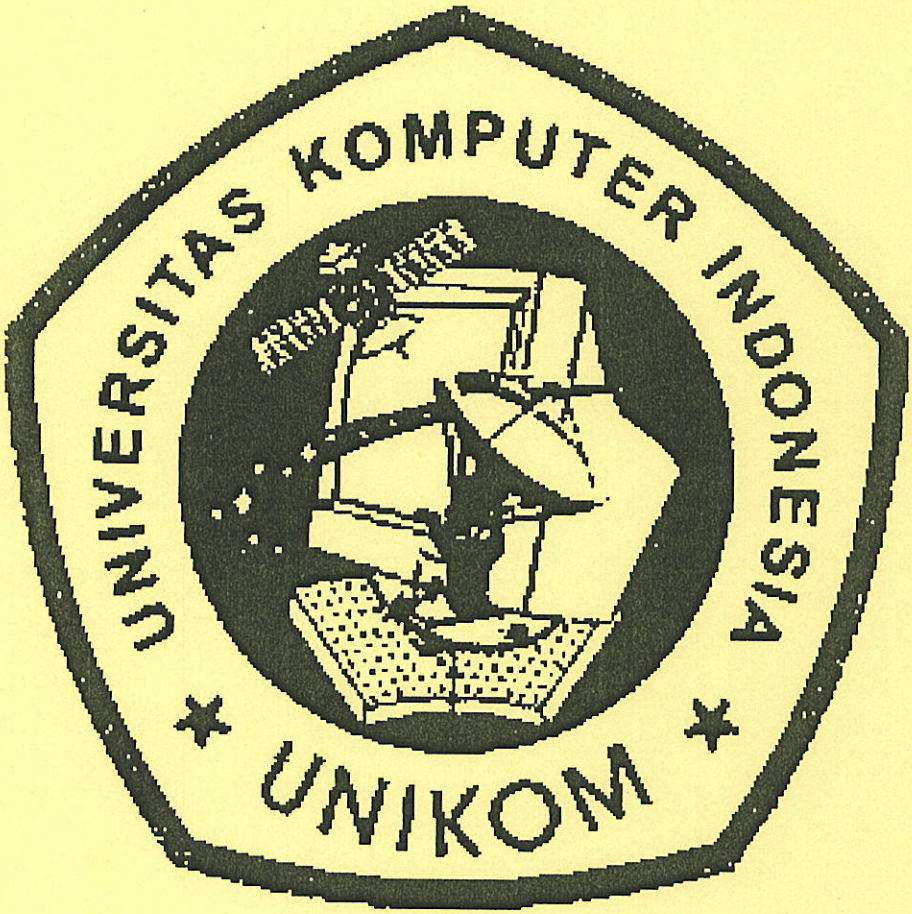
4. Kotamadya Bandung

➢ PIP Pasar Induk Caringin

Alamat : Pasar Induk Caringin

Petugas : 2 (dua) orang (Tatang dan Asep Lukman)

Wilayah Kerja : Pasar Induk Caringin dan Pasar Baru


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM